

SKRIPSI
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KELURAHAN HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI
KABUPATEN MAROS

ANDI KURNIATI
E011201015



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRAK

Andi Kurniati (E011 20 1015), Evaluasi Program Keluarga Harapan Kelurahan Hasanuddin Berdasarkan Indikator Evaluasi Program , - 91 Halaman + 10 Tabel + 7 Gambar + 11 Lampiran, Dibimbing oleh Nurdin Nara Dan Muhammad Rusdi.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan Studi Dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun fokus penelitian berdasarkan pada 6 indikator teori dari Dunn (2003) yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan Responsivitas dan ketepatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Program Keluarga Harapan belum efektif. Hal ini ditandai dengan beberapa aspek, yaitu :1) Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dari pertemuan bulanan yang rutin berjalan dengan baik sehingga memudahkan pendamping PKH dalam pemutakhiran data di Kelurahan Hasanuddin. 2) Efisiensi pelaksanaan PKH di kelurahan Hasanuddin Sudah Berjalan Dengan efisien dikarenakan proses pencairan PKH sudah menggunakan ATM dan Kantor Pos. selain itu, penerima PKH sudah paham mengenai jumlah dana yang diberikan sesuai dengan komponen yang ada. 3) Kecukupan PKH di desa Kelurahan Hasanuddin menunjukkan kurang memenuhi kriteria meskipun bisa mengatasi masalah biaya pendidikan, bantuan ini tidak sepenuhnya mengatasi masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak bisa memecahkan masalah kemiskinan. 4) Pemerataan distribusi PKH di Kelurahan Hasanuddin belum merata karena bantuan ini belum sepenuhnya terdistribusi pada RTSM, Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa hanya 109 KK dari 494 KK yang menerima bantuan PKH. 5) Responsivitas PKH di Kelurahan Hasanuddin sangat positif dan masyarakat merasa puas dengan bantuan yang diberikan meskipun yang diberikan bukanlah bantuan penuh; 6) Ketepatan pelaksanaan PKH di Kelurahan Hasanuddin sudah sesuai dengan sasaran yang ditentukan yaitu masyarakat yang kurang mampu hanya saja masih ada masyarakat yang berhak menerima justru tidak menerima hal ini terjadi karena kuota yang terbatas dan adanya masyarakat yang tidak terdaftar di DTKS.

Kata kunci : Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Evaluasi Program



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

ABSTRACT

Andi Kurniati (E011 20 1015), Evaluation of the Hasanuddin Village Family Hope Program Based on Program Evaluation Indicators, - 91 Pages + 10 Tables + 7 Pictures + 11 Attachments, Supervised by Nurdin Nara and Muhammad Rusdi.

This research aims to find out and analyze the evaluation of the Family Hope Program in Hasanuddin Village, Mandai District, Maros Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive research method. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation studies related to the problems studied. The research focus is based on 6 theoretical indicators from Dunn (2003), namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equal Responsiveness and Accuracy.

The results of this research indicate that the Evaluation of the Family Hope Program has not been effective. This is indicated by several aspects, namely: 1) The effectiveness of the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Hasanuddin Village has been going well, this is indicated by regular monthly meetings running well, making it easier for PKH assistants to update data in Hasanuddin Village. 2) The efficiency of implementing PKH in Hasanuddin sub-district has been running efficiently because the PKH disbursement process already uses ATMs and Post Offices. Apart from that, PKH recipients already understand the amount of funds given according to the existing components. 3) The adequacy of PKH in Hasanuddin sub-district village shows that it does not meet the criteria, although it can overcome the problem of education costs, this assistance does not fully overcome financial problems to meet family needs and cannot solve the problem of poverty. 4) The distribution of PKH in Hasanuddin Village is not evenly distributed because this assistance has not been fully distributed to RTSM. This can be seen from the data which shows that only 109 families out of 494 families received PKH assistance. 5) PKH's responsiveness in Hasanuddin Village is very positive and the community is satisfied with the assistance provided even though what is provided is not full assistance; 6) The accuracy of implementing PKH in Hasanuddin Village is in accordance with the specified target, namely disadvantaged communities, but there are still people who are entitled to receive it but do not receive it. This happens because the quota is limited and there are people who are not registered with DTKS.

Keywords: Evaluation, Family Hope Program, Poverty, Program Evaluation



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Kurniati

NIM : E011201015

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN KELURAHAN HASANUDDIN KACEMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 14 Maret 2024



Andi Kurniati
E011201015



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andi Kurniati
NIM : E011201015
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Program Keluarga Harapan Kelurahan
Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Telah diperiksa oleh pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Hasanuddin.

Makassar 4 Maret 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 196309031989031002

Dr. Muhammad Rusdi, M.Si
NIP 197003011999031001

Mengetahui:



Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 196310151989031006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andi Kurniati
NIM : E011201015
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Evaluasi Program Keluarga Harapan Kelurahan
Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Makassar, 13 Maret 2024

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Nurdin Nara, M.Si

Sekretaris Sidang : Dr Muhammad Rusdi M.Si

Anggota : Prof. Dr. Mohamad Thahir Haning, M.S.(.....)

: Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos.,M.A.P.(.....)

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KELURAHAN HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS**” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang idola terbaik sepanjang zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung . untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Phil. Sukri, SIP.,M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos, M.A.P** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Mantono S** dan Ibunda tercinta **Andi Rahmaniah** serta adik **tercinta Andi Wahyudi** , yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis sehingga bisa sampai pada titik ini.
6. Penasehat Akademik **Dr. Nurdin Nara, M.Si** terima kasih atas pelajaran, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama ini.
7. Pembimbing I **Dr. Nurdin Nara, M.Si** dan Pembimbing II **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si** yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Dewan Penguji **Prof. Dr. Moh. Thahir, M.Si** dan **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos.,MAP** terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membantu dan membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Para **Dosen Departemen Ilmu Administrasi** yang telah memberikan banyak pengetahuan, serta pengalaman yang berharga selama proses perkuliahan selama kurang lebih 3 tahun perkuliahan.
10. Seluruh Staff Ilmu Administrasi dan staff di lingkup Fisip Unhas tanpa terkecuali (**Ibu Rosmina , Ibu Cia, Pak Andi Revi dan Pak Lili**) terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini kepada penulis.

11. Terima Kasih juga kepada seseorang yang paling berharga setelah orang tua penulis **Muhammad Pikri Syam A.Md.T** yang selalu memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis sehingga bisa sampai pada titik ini.
12. Teman Seperjuangan penulis (**Sri Rahmawati Dewi , Nur Fauzi Zaahirah, Ilva, Naqila Putry**) terima kasih sudah jadi patner yang baik selama ini yang selalu berbagi kebahagiaan maupun kesedihan bersama, saling membantu, saling support , saling mendengarkan, dan saling menghargai bahkan memberikan moment-moment berharga yang tidak akan penulis lupa, dan terima kasih atas masukan dan bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Teman yang seperti saudara saya **Nurhaliza Ramadhani, Nurmi Yusuf** dan **Ade Syahrani D** terima kasih atas dukungan dan bantuannya the best.
14. Terima kasih kepada **Nur Ihsma** karena telah membantu selama penelitian di Kabupaten Maros, serta support dan bantuannya sehingga penulis sampai pada tahap ini.
15. Teman – teman terbaik sejak SMA yang baik dan selalu ada sehingga saat ini (**Lisa, Nurmi, Icha, Iras**). Terima kasih atas segala dukungan dan hiburan ketika penulis sedang masa sulit.
16. Terima Kasih kepada teman KKNT Desa Wisata Kabupaten Maros, Anak Pak Desa (**Maylinda, Eby, Maria, Dilla, Dwi, Atha, Nanda, Shafwan, fitri, Ages dan Fadli**) yang telah memberikan pengalaman dan kenangan yang sangat menyenangkan selama kurang lebih satu bulan mengabdikan di masyarakat.

17. Terima Kasih kepada **Kepala Desa Tengaparang dan jajarannya** karena telah menerima kami dengan baik selama melakukan KKN kurang lebih satu bulan di masyarakat.
18. Terima Kasih juga **Kepada Bapak Posko dan Ibu Posko beserta keluarga** atas bantuan, perhatian, pengertian , dan pengalaman selama kami di posko.
19. **PENA 2020** Teman seperjuangan selama perkuliahan dikampus yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan perhatian kalian selama perkuliahan, terima kasih atas momen kebersamaan yang telah kita lewati bersama, semoga kedepannya kalian semua sukses dan cita-citanya tercapai.
20. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuan, saran, masukan, support kepada penulis sehingga bisa melewati dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar 6 Februari 2024

Andi Kurniati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	10
I.3 Tujuan Penelitian	11
I.4 Manfaat Penelitian	11
I.4.1 Manfaat Teoritis	11
I.4.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
II.1 Konsep Evaluasi	13
II.1.1 Pengertian Evaluasi	13
II.1.3 Tujuan Evaluasi	14
II. 2 Konsep Kebijakan Publik.....	15
II.2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	15
II.2.2 Tujuan Kebijakan Publik	16
II.3 Konsep Evaluasi Kebijakan	16
II.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan.....	16
II.3.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan	17
II.3.3 Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	19
II.4 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)	20
II.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	20
II.4.2 Dasar Hukum	21
II.4.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	23
II.4.4 Kriteria Penerima Manfaat PKH	23

II.4.5 Besaran Manfaat dan jangka Waktu kepersertaan PKH.....	24
II.4.6 Hak keluarga Penerima Manfaat PKH.....	25
II.5 Peran PKH dalam Pengentasan Kemiskinan.....	25
II.5.1 Pengertian Kemiskinan	25
II.5.2 Strategi Penanggulangan kemiskinan	26
II. 6 Penelitian Terdahulu.....	28
II.7 Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
III.1 Pendekatan Penelitian.....	32
III.2 Lokasi Penelitian	32
III.3 Fokus Penelitian.....	33
III.4 Jenis Sumber Data	34
III.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
III.6. Informan Penelitian.....	35
III.7 Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	38
IV. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
IV.1.1 Sejarah Kelurahan Hasanuddin.....	38
IV.1.2 Kondisi Geografis Kelurahan Hasanuddin	38
IV.1.3 Visi dan Misi Kelurahan Hasanuddin	40
IV. 2. Deskripsi Dinas Sosial Kabupaten Maros	44
IV.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial	45
IV.2.2 Sumber Daya Aparatur	46
IV.2.3 Sarana dan Prasarana	47
IV.3 Program Keluarga Harapan	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
V.1 Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Hasanuddin Kecamatan.....	50
V.1.1 Efektivitas	57
V.1.2 Efisiensi	59

V.1.3 Kecukupan.....	62
V.1.4 Pemerataan	64
V.1.5 Responsivitas	67
V.1.6 Ketepatan	68
BAB VI PENUTUP	71
VI. 1 Kesimpulan.....	71
VI. 2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Peta Batas Wilayah Kelurahan Hasanuddin.....	40
Gambar IV.2 Struktur Pemerintahan Kelurahan Hasanuddin	42
Gambar IV.3 Alur Pelayanan Pada Kelurahan Hasanuddin	44

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Masyarakat Miskin Kelurahan Hasanuddin	6
Tabel I.2 Rekap Jumlah Penerima Bansos PKH Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 1.4 Kerangka Pikir	32
Tabel III.1 Fokus Penelitian	34
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk	41
Tabel IV.2 Jumlah Data Pegawai Pada Kelurahan Hasanuddin,Maros	43
Tabel IV.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	46
Tabel V. 1 Variasi Hasil Wawancara Informan	51
Tabel V. 2 Jumlah Kriteria KPM di Kelurahan Hasanuddin.....	61
Tabel V. 3 Jumlah Penerima PKH Kecamatan Mandai	66

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada Tahun 2007 pemerintah menciptakan inisiatif yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan. (Kementerian Sosial RI, 2021) Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program keluarga harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini berupa bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga yang sangat miskin (KSM), dengan penentuan penerimaan berdasarkan beberapa kriteria terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini ditangani oleh daerah-daerah yang dianggap memerlukan dukungan dari program tersebut, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah diidentifikasi oleh pembuat kebijakan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan program Keluarga Harapan (PKH), melalui PKH ini pemerintah berharap dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya melalui pemberian dana bantuan untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan dapat mendapatkan

fasilitas kesehatan yang layak. PKH berupa bantuan tunai yang dikhususkan pada pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam proses pelebagaan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada dua komponen yaitu pada bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan. Dengan Pendidikan yang layak dan berkualitas tinggi, sumber daya manusia secara otomatis meningkat, komponen pendidikan yang ada dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi Pendidikan wajib belajar 12 tahun yakni menempuh tingkat Pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/Mts sederajat. Sedangkan komponen Kesehatan PKH yaitu meningkatkan Kesehatan pada Ibu dan Anak. khususnya kelompok keluarga sangat miskin melalui pemberian intensif untuk melakukan kunjungan Kesehatan yang bersifat preventif (Herliani & Setiawati, 2022).

Tujuan utama dari PKH adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia, terutama masyarakat miskin dengan upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran perkembangan dimasa yang akan datang. Untuk jangka pendek, program pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM), diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sedangkan untuk jangka panjang, melalui kewajiban yang dipersyaratkan diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku serta berkesinambungan terhadap perbaikan Kesehatan ibu hamil, balita serta tingkat Pendidikan anak-anak RTSM/KSM. Sehingga pada akhirnya dapat memutus rantai kemiskinan. (Febriani et al., 2020).

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan Basis Data Terpadu yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Peserta harus terdaftar dan menghadiri pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan Ibu hamil, pemberian nutrisi dan imunisasi 4 serta timbang badan anak balita. Di sisi lain, kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memeriksa kehadiran anggota PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus untuk anggota PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai salah satu solusi pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, Kemiskinan adalah isu sosial yang dihadapi oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah sentral yang mendapat perhatian dari semua pihak dan harus segera diatasi. Meskipun setiap negara memiliki konteks permasalahan yang berbeda, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya mengatasi tantangan kemiskinan. Seluruh negara, termasuk Indonesia, sepakat bahwa kemiskinan adalah persoalan sosial yang menghambat kesejahteraan dan perlu diatasi dengan baik.

Kemiskinan di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru dan telah menjadi perhatian yang konsisten. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan Asia pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang pada September 2022. Dalam kurun waktu antara Maret 2022 dan

September 2022, terjadi peningkatan sebanyak 0,20 juta orang (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Berbicara mengenai kemiskinan, di negara Indonesia sendiri kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan yang harus dikaji secara terus menerus. Selama ini telah banyak program-program pemerintah yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan, namun tidak dapat dipungkiri upaya tersebut sering kali masih belum menghasilkan sesuatu penyelesaian seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah pun telah melakukan upaya-upaya menanggulangi kemiskinan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Maros pada 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) ada penurunan sekitar 0,14 persen. Kepala Bapelitbangda Muh Najib mengatakan pada 2021 angka kemiskinan sebanyak 9,57 persen kemudian tahun 2022 turun menjadi 9,43 persen. Ia juga tak menampik program kementerian sosial cukup menurunkan angka kemiskinan, seperti pada program PKH, misalnya tercatat 715 penerima telah dikeluarkan karena telah masuk kategori sejahtera. Salah satu kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi adalah kecamatan Tompobulu dengan persentase 23,22 persen atau sekitar 3.759 jiwa. (Tribun Maros, 2022)

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Miskin Kelurahan Hasanuddin

Tahun	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Jumlah Penduduk Miskin
2022	497 KK	1495 Jiwa
2023	494 KK	1482 Jiwa

Sumber : Kelurahan Hasanuddin,2023

Berdasarkan data di atas, Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kelurahan Hasanuddin di tahun 2022 sebanyak 497 KK sedangkan di tahun 2023 sebanyak 494 KK . hal ini dapat kita dilihat bahwa Jumlah Kepala Keluarga Miskin di tahun 2023 berkurang jika dibandingkan dengan 2022. Tabel 1.1 menunjukkan terdapat penduduk miskin dengan presentasi penduduk miskin sebesar 1482 jiwa pada tahun 2023 di Kelurahan Hasanuddin.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Presiden RI Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial RI sudah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) keseluruh Indonesia termasuk di Kelurahan Hasanuddin kecamatan Mandai, Penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini diperuntukkan kepada keluarga yang kurang mampu atas dasar hasil basis data terpadu dari pusat. Program Keluarga Harapan (PKH) yakni program keluarga harapan (Permensos 1/2018) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Tabel 1.2 Rekap Jumlah Penerima Bansos PKH Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Tahun	Jumlah KPM
2019	91 KK
2020	103 KK
2021	107 KK
2022	126 KK
2023	109 KK

Sumber : Pendamping PKH Kelurahan Hasanuddin

Berdasarkan data di atas, jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Hasanuddin di tahun 2023 sendiri bisa dikatakan berkurang jika dibandingkan dengan 2022. Tabel 1.2 menunjukkan terdapat jumlah penerima PKH 109 KK pada tahun 2023 sedangkan di tahun 2022 sebanyak 126 KK di Kelurahan Hasanuddin.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), pengaturannya diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, yang mengandung prosedur pelaksanaan PKH mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program. Namun, dalam pelaksanaannya di Kecamatan Mandai, khususnya di Kelurahan Hasanuddin, beberapa temuan menunjukkan bahwa (1) distribusi bantuan PKH belum merata, terlihat dari masih banyaknya keluarga miskin yang belum menerima bantuan tersebut, (2) kurangnya transparansi terkait pendataan awal calon penerima PKH, dan (3) kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan, yang mengakibatkan beberapa

masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima bantuan masih mendapatkannya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai. Tujuan dari evaluasi pelaksanaan program ini adalah untuk menyajikan bukti konkret mengenai kemajuan program, dengan merujuk pada kriteria evaluasi yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini sesuai dengan kerangka evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003). Kerangka tersebut melibatkan enam indikator evaluasi kebijakan, yakni: Efektivitas, Menilai sejauh mana hasil yang diinginkan dari program telah tercapai. Efisiensi, Mengukur sejauh mana upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kecukupan, Mengevaluasi seberapa baik pencapaian hasil dapat mengatasi masalah yang diidentifikasi. Perataan, Menilai sejauh mana manfaat dari program didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Responsivitas, Mengukur respons masyarakat terhadap bantuan yang diterima melalui program. Ketepatan, Menilai sejauh mana hasil yang diinginkan secara konkret memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan menerapkan kerangka evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Hasanuddin.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rina Gaguk Ika Prayitna, dkk (2018) dengan judul "Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan," menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) telah meningkatkan tingkat kesejahteraan pesertanya, mengurangi diskriminasi gender, dan meningkatkan partisipasi dalam program. Namun, PKH masih belum sepenuhnya memberikan kontrol penuh kepada peserta terhadap lembaga pendidikan dan kesehatan, terutama terkait dengan aspirasi personal mereka.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas evaluasi PKH dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Meskipun demikian, perbedaan muncul dalam metode evaluasi yang diterapkan, di mana penelitian saya menggunakan metode evaluasi single program *before after*.

Selanjutnya, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wenny Desty Febrian dkk (2020) membahas "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota" dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Nagari Tanjuang Bungo berjalan cukup baik, meskipun masih ada kendala dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat (PKH), menyebabkan beberapa masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan PKH tidak menerimanya. Hambatan lainnya adalah kurangnya pendamping yang intensif bagi peserta, sehingga dana PKH dibelanjakan di luar ketentuan yang ditetapkan.

Persamaan dengan penelitian saya terletak pada topik pembahasan mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), namun perbedaannya terletak pada jumlah indikator evaluasi. Penelitian ini hanya menggunakan tiga dari

enam indikator evaluasi Dunn (2003), yakni efektivitas, responsivitas, dan pemerataan.

Berikutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswati Saragi, dkk (2021) yang membahas Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut mencakup:

1. Penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang telah tercatat dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap melibatkan pengecekan kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian Sosial.
2. Terdapat kendala dalam pelaksanaan, terutama dalam kesulitan mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk melakukan pengecekan dalam pembinaan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus keduanya yang menitikberatkan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan penggunaan metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan analisis pelaksanaan PKH daripada aspek evaluasi program seperti yang dibahas dalam penelitian saya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prayogi Wicaksono (2022) mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk optimalisasi Pelayanan Sosial bagi lanjut Usia di Kecamatan Siliragung

Kabupaten Banyuwangi, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Temuan penelitian tersebut mencakup:

1. Meskipun program PKH berjalan dengan baik, pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal karena masih menghadapi kendala dan hambatan tertentu.
2. Hambatan dalam pelaksanaan PKH melibatkan watak penerima program yang kurang bertanggung jawab, ketidakakuratan data, dan kurangnya fasilitas penunjang kinerja bagi pendamping PKH.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah keduanya membahas Program Keluarga Harapan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada pengimplementasian PKH, berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Program PKH Di Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros?
2. Bagaimana Efisiensi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros?

3. Bagaimana Kecukupan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros?
4. Bagaimana Pemerataan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros?
5. Bagaimana Responsivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros?
6. Bagaimana Ketepatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, maka dapat di simpulkan bahwa tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk menegetahui evaluasi program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Dengan adanya penelitian tersebut dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pikiran terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi karya dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik, dapat memberikan pengetahuan dan informasi atau sebagai sarana untuk mengetahui pola serta alur dari kebijakan Program

Keluarga Harapan (PKH) untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera serta mengentaskan kemiskinan.

I.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan masalah dalam Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai.
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah setempat dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan bantuan PKH.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Evaluasi

II.1.1 Pengertian Evaluasi

Menurut Dunn (2007) dalam analisis kebijakan publik, evaluasi itu membandingkan antara apa yang seharusnya terjadi dengan performa kebijakan secara nyata. Evaluasi tidak hanya memperlihatkan masalah yang muncul. Namun, juga berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran untuk perbaikan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Evaluasi pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan yang akan digunakan untuk memprediksi, menghitung dan memantau pelaksanaan program di masa yang akan datang agar jauh lebih baik. Dengan demikian, evaluasi lebih melihat ke depan daripada kesalahan masa lalu, dan diarahkan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program. Evaluasi adalah upaya untuk mengukur dan mengevaluasi secara objektif pencapaian hasil yang direncanakan. Hasil evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik terhadap perencanaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang (Yusuf, 2000).

Menurut Djali dan Muljono (2007), berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses menilai berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, dimana objek yang dievaluasi diputuskan. Subarsono 11 (2016:119) menunjukkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat pembuatan kebijakan. Rossi &

Freeman dalam Pasolong (2013:6) juga mengungkapkan bahwa evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil program berkaitan dengan implementasi, untuk memantau perilaku mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, dan untuk mempengaruhi respon dari mereka yang berpartisipasi dalam program di luar lingkungan politik.

II.1.3 Tujuan Evaluasi

Menurut Subarsono (2016:120-122) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan dengan adanya evaluasi, maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan dengan evaluasi agar dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) agar dapat mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan ditujukan untuk melihat dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan masa depan. Evaluasi memiliki tujuan akhir, yaitu untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan yang akan datang agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik lagi

II. 2 Konsep Kebijakan Publik

II.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang diarahkan pada tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik adalah keputusan (politik) untuk mencapai tujuan bernegara. Pandangan Riant Nugroho ini memberikan pandangan bahwa kebijakan publik tidak harus selalu dimulai dari masalah publik, tetapi dapat menjadi suatu “alat” untuk mencapai tujuan bernegara yang ditetapkan (Praja, 2020).

Menurut Dye (1981) menyebutkan kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan pemerintah *“is whatever government choose to do or not to do”*. Menurut Nasuka dalam Pasolong (2013:39) menyebutkan kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum.

Dari beberapa penjelasan dan pendapat yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pejabat yang memiliki wewenang, bertujuan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan publik. Keputusan-keputusan tersebut membawa konsekuensi logis dalam bentuk tindakan dan pernyataan yang diatur oleh pemerintah.

II.2.2 Tujuan Kebijakan Publik

Fungsi Utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan, dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :

- a. Menciptakan sebuah ketertiban dalam lingkungan masyarakat;
- b. Melindungi hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia;
- c. Menciptakan sebuah ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat;
- d. Diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service); dan
- e. Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah

II.3 Konsep Evaluasi Kebijakan

II.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah salah satu tahapan penting dalam kebijakan. Salah satu bidang penting lain yang dipergunakan untuk mengawasi jalannya proses implementasi adalah pemantauan. Dalam proses pemantauan ini dilakukan pengamatan langsung di tempat dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Beberapa pengertian evaluasi kebijakan menurut para ahli:

1. Dunn (2003) mengatakan istilah evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Dalam hal ini evaluasi mengenai nilai dan manfaat dari hasil kebijakan, yang berarti bahwa evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan.
2. Mardapi, (2012) Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya.

II.3.2 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Dalam perkembangannya, evaluasi sangat diperlukan dalam melihat kinerja dari kebijakan/program itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Samodra Wibawa (1994) bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut :

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Hal ini karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. Dalam analisis kebijakan, Dunn (2003) mengemukakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai dan peluang dan tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan sejauh mana tujuan-tujuan tertentu dan sasaran tertentu telah dicapai dalam menyelesaikan masalah;
2. Evaluasi berkontribusi untuk mengklarifikasi dan mengkritik nilai-nilai dibalik pemilihan tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan sasaran. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme;
3. Evaluasi memberi sumbangan pada penerapan metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi juga dapat membantu mengidentifikasi

alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada perlu diganti atau diperbaharui.

II.3.3 Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2003) ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, ketepatan.

1. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk/layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.
3. Kecukupan (Adequacy) Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang ada.
4. Pemerataan (Equity) Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh 20 sasaran kebijakan publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompokkelompok yang berbeda dalam

masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

5. Responsivitas (Responsiveness) Keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat. Setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.
6. Ketepatan (Appropriateness) Ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan (Razali, 2018).

II.4 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

II.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai wujud perlindungan sosial untuk masyarakat secara umum untuk mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah secara penuh dalam sektor sosial melalui pemberian bantuan sosial secara bersyarat kepada Keluarga yang tergolong dalam kategori Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan

merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dimulai dari sejak tahun 2007 sebagai upaya pengembangan sistem perlindungan sosial dalam lingkup masyarakat. (Kemensos, 2020 dalam Denok Kurniasih & Yusuf 2023:252)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, dengan tujuan khusus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program perlindungan sosial Indonesia yang memberikan bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria tertentu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

II.4.2 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dijelaskan bahwa pelaksanaan PKH berdasarkan pada peraturan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5235);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 31
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

II.4.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2020), Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat

II.4.4 Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima manfaat PKH dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan komponen kelompok tersebut, yang meliputi kesejahteraan sosial,

pendidikan, dan kesehatan. Rincian berikut adalah di antara kriteria untuk setiap komponen:

1. Komponen kesehatan, yaitu terdiri atas ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun
2. Komponen pendidikan, yaitu terdiri atas Anak SD/Sederajat; pesantren usia > 6 s.d. 12 tahun, Anak SMP/Sederajat; pesantren usia > 12 s.d. 15 tahun, dan Anak SMA/Sederajat; pesantren usia > 15 s.d. 21 tahun
3. Komponen kesejahteraan sosial, yaitu terdiri atas lanjut usia > 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.

II.4.5 Besaran Manfaat dan jangka Waktu kepersertaan PKH

Program Keluarga Harapan menawarkan dua jenis bantuan sosial: bantuan tetap dan bantuan komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendampingan yang konsisten untuk setiap keluarga
 - a. Rp. 550.000,- per keluarga per tahun.
 - b. AKSES PKH : Rp. 1.000.000,- per keluarga per tahun.
2. Bantuan komponen untuk seluruh anggota keluarga PKH
 - a. Ibu Hamil : Rp. 3.000.000 per tahun
 - b. PAUD : Rp. 3.000.000 per tahun
 - c. SD : Rp. 900.000 per tahun
 - d. SMP : Rp. 1.500.000 per tahun
 - e. SMA : Rp. 2.000.000 per tahun
 - f. Cacat berat : Rp. 2.400.000 per tahun
 - g. Lanjut Usia : Rp. 2.400.000 per tahun

Kepesertaan PKH tidak bersifat permanen, meskipun Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan yang memakan waktu lama. Keikutsertaan penerima PKH sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan; jika tidak ada lagi persyaratan yang dapat dipenuhi, masyarakat tidak dapat lagi menerima bantuan dan dikeluarkan dari penerima PKH. Sertifikasi ulang akan dilakukan pada tahun kelima kepesertaan PKH. Sertifikasi ulang adalah kegiatan pendataan yang dilakukan pada tahun kelima anggota rumah tangga dan menggunakan metode tertentu.

II.4.6 Hak keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga penerima PKH berhak mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. Pendampingan PKH
- c. Pelayanan fasilitas Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; selain itu;
- d. Skema dukungan pelengkap di bidang perumahan, energi, ekonomi, subsidi, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan penting lainnya.

II.5 Peran PKH dalam Pengentasan Kemiskinan

II.5.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut Huraerah, kebijakan menanggulangi kemiskinan mengalami kesalahan paradigma. Pertama, masih menitikberatkan pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dari segi ekonomi bukanlah masalah kemiskinan yang sebenarnya, sehingga penanggulangan

kemiskinan dengan penekanan pada ekonomi telah gagal. Kedua, meskipun program penanggulangan kemiskinan harus bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, ada lebih banyak nuansa kedermawanan daripada produktivitas. Ketiga, menempatkan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Keempat, pemerintah masih menjadi penguasa daripada fasilitator (Purwanto dkk, 2013: 80).

II.5.2 Strategi Penanggulangan kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan dibagi ke menjadi tiga klaster yaitu klaster 1, klaster 2 dan klaster 3. Masing-masing klaster memiliki tujuan, sasaran dan tujuan yang berbeda, meskipun sama-sama fokus pada penanggulangan kemiskinan.

- a. Klaster 1, yaitu bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Program pada klaster 1 bertujuan untuk mengurangi beban rumah tangga miskin dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Pengelompokan klaster ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah, Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas, dan program Raskin. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan keuangan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan syarat yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan bagi anggota keluarga RTSM. Program ini, bertujuan mengurangi beban RTSM dalam jangka pendek dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi 20 dalam jangka panjang,

sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan (Kemenkominfo, 2011: 18).

- b. Klaster 2, yaitu penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program pada klaster 2 bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Termasuk dalam klaster ini yaitu PNPM, Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), serta Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif (Kemenkominfo, 2011: 23).
- c. Klaster 3, yaitu penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat posisi usaha ekonomi mikro dan makro. Tujuan dari program kluster tiga adalah untuk memberikan akses kepada usaha mikro dan makro serta memperkuat perekonomian. Termasuk dalam program ini yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE). KUBE merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anggota KUBE dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sasaran program KUBE adalah keluarga miskin produktif (masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi mereka atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi mereka). Keluarga Miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya atau mengalami penghentian penghasilan (Kemenkominfo, 2011: 38).

II. 6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah direkomendasikan oleh penulis sebagai sumber informasi untuk penelitian penulis. Menurut penelitian penulis, berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berupa artikel jurnal.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Jenis Penelitian	Informasi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber Penelitian
1.	Kualitatif	Hasil penelitian yaitu Penerapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mampu menambah tingkat kesejahteraan pesertanya, memberikan adanya diskriminasi gender, meningkatkan partisipasi terhadap program, namun PKH belum sepenuhnya menyentuh tingkat 28ontrol peserta terhadap Lembaga pendidikan dan kesehatan ketika bersinggungan dengan kebutuhannya berdasarkan pilihan-pilihan aspirasi personalnya.	Evaluasi PKH metode penelitian kualitatif.	Metode evaluasi single program <i>before after</i> .	Keberdayaan perempuan di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Lokasi: Kabupaten Ponorogo Oleh: Rina Gaguk Ika Prayitna,dkk (2018)
2	Kualitatif	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Tanjung Bungo	Persamaan dengan	penelitian ini hanya	Evaluasi Program Keluarga

No	Jenis Penelitian	Informasi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber Penelitian
		<p>Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota sudah berjalan dengan cukup baik walaupun belum optimal dalam segi penetapan Keluarga Penerima Manfaat (PKH) sehingga banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH tetapi tidak mendapatkan bantuan. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan yaitu tidak adanya pendamping yang intens mendampingi para peserta sehingga dana Program Keluarga Harapan (PKH) dibelanjakan di luar ketentuan yang dipersyaratkan,</p>	<p>penelitian memiliki topik pembahasan mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).</p>	<p>menggunakan 3 dari 6 indikator evaluasi dari William Dunn yaitu efektifitas, responsivitas, dan pemerataan.</p>	<p>Harapan di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Oleh: (Febrian Desty et al., 2020)</p>
3	Kualitatif	<p>Hasil penelitian yaitu: Penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di system Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Sedangkan persamaan penelitian di atas</p>	<p>perbedaan yaitu penelitian ini lebih</p>	<p>Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di</p>

No	Jenis Penelitian	Informasi Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber Penelitian
		(DTKS), namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian Sosial. Serta terdapat kendala dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk pengecekan dalam pembinaan.	dengan penelitian saya adalah sama-sama berfokus pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan metode penelitian yang digunakan,	berfokus pada analisis pelaksanaan PKH.	Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Oleh: Siswati Saragi,dkk (2021)

II.7 Kerangka Pikir

Berdasarkan data dan observasi yang menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, maka peneliti berusaha mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Hasanuddin menggunakan enam indikator Evaluasi kebijakan Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemajuan suatu program yang dijalankan, Menurut teori evaluasi

kebijakan menurut Dunn (2003) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Dengan kata lain evaluasi terhadap suatu program kebijakan melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil yang diinginkan sehingga dapat diketahui dengan indikator evaluasi apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan program. Berdasarkan uraian diatas penulis menggambarkan bagan kerangka konsep sebagai

Tabel 1.4 Kerangka Pikir

